

**TESIS**

**POLITIK HUKUM PENGUATAN KEWENANGAN  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
DI ERA EKONOMI DIGITAL**



**PRIMA AMRI**

**No. Mhs: 225214743**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2024**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : Prima Amri  
Nomor Mahasiswa : 225214743  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : POLITIK HUKUM PENGUATAN  
KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS  
PERSAINGAN USAHA DI ERA EKONOMI  
DIGITAL

**Disetujui oleh:**

Dosen Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
1. Dr. Anny Retnowati, S.H, M.Hum.	03/12'23	
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H, M.Hum.	17/1'24	

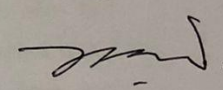
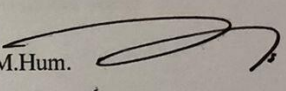
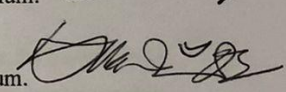


**PENGESAHAN UJIAN TESIS**

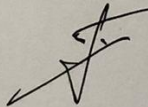
Nama : PRIMA AMRI  
NomorMahasiswa : 225214743  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : POLITIK HUKUM PENGUATAN KEWENANGAN  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI ERA  
EKONOMI DIGITAL

Telah diuji dan dinyatakan lulus dihadapan dewan penguji pada tanggal 24 Januari 2024

**Dewan Penguji**                      **Nama**                                      **Tanda tangan**

- |               |   |  |
|---------------|---|--|
| 1. Ketua      | Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.            |   |
| 2. Sekretaris | Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. |   |
| 3. Anggota    | Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.    |  |

**Ketua Program Studi**



**Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. A. Anita Christiani, S.H., M.Hum.**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : PRIMA AMRI

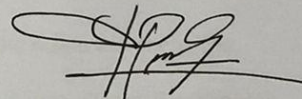
No. Mahasiswa : 225214743

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:  
“POLITIK HUKUM PENGUATAN KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS  
PERSAINGAN USAHA DI ERA EKONOMI DIGITAL”

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 21 Januari 2024

Yang menyatakan

  
PRIMA AMRI

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya persembahkan atas Berkat dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul “Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital” sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Peneliti menyadari penulisan ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan moril, mental, intelektual, dan finansial dari banyak pihak. Peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu untuk memberikan perhatian dan kebaikan hati selama penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Tesis I. Terima kasih peneliti haturkan atas pengertian yang luar biasa, arahan, perhatian, dan bimbingan yang mungkin menyita waktu dan energi ibu.
4. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Tesis II. Terima kasih peneliti haturkan atas bimbingan, masukan, dan motivasi yang terus diberikan selama penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas ilmu dan pencerahannya selama peneliti menempuh pendidikan.

6. Medcom Group selaku penyelenggara program beasiswa *Online Scholarship Competition* (OSC) yang telah memberikan bantuan biaya pendidikan dan *living cost* selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Kedua orang tua saya Amri Abdullah (Alm) dan Maimunah (Almh) sebagai sosok ayah dan ibu yang telah berjasa mengasah, mengasih, dan mengasuh peneliti hingga akhir hayatnya.
8. Hadi Amri dan Elly Amri selaku saudara yang terus mendukung setiap langkah perjuangan peneliti selama menempuh pendidikan di Yogyakarta.
9. Seluruh rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Tahun Angkatan 2022. Terima kasih membuat hari-hari peneliti menjadi lebih berwarna dan menyenangkan selama menjalani perkuliahan, kalian telah menjadi teman sekaligus keluarga bagi saya dalam menempuh pendidikan.
10. Rekan-rekan konsentrasi hukum bisnis, terima kasih telah bersama-sama berproses selama ini.
11. Fernando, Zulfikar, Ikhsan, Erief, Erika, Finishia, dan Selly sebagai sahabat sejak masa SMA hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi *support system* peneliti selama ini, maaf telah menjadi sahabat yang merepotkan kalian.
12. Hannah Abbey dan Victoria Angela sebagai sahabat yang dipertemukan pada saat acara *rewarding* penerima beasiswa dan teman bermain, bercerita peneliti hingga saat ini.
13. Sahabat-sahabat Novi, Sasha, Ghea, Julia Mia, Amalia, Tin, Dary, Tomas, Lita, Romo Advent, Ayu, Audi. Terima kasih karena keberadaan kalian

adalah sebuah rezeki yang peneliti syukuri bertemu dengan orang-orang baik seperti kalian *You're all heaven-sent gift from God.*

14. Terima kasih kepada pihak-pihak yang pernah hadir dalam kehidupan peneliti dan memberikan kesan yang mungkin tidak dapat peneliti cantumkan semuanya dalam kata pengantar ini.

Peneliti merasa masih terdapat berbagai kekurangan dalam penelitian tesis ini, tetapi apa boleh buat tulisan ini memang diharapkan menjadi ajakan diskursif yang kelak segera diperbaharui bahkan digantikan tatkala hadir tulisan-tulisan yang jauh lebih relevan, semoga tesis ini telah mengarah pada tujuan tersebut. Terima kasih yang tidak terhingga untuk Tuhan yang terus menjadi tiang penopang pertama dan terakhir, bahkan ketika kenyataan tidak lagi dapat dijadikan pegangan.

Yogyakarta, 21 Januari 2024

Prima Amri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN UJIAN TESIS .....</b>	<b>.iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Keaslian Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Pengaturan Pelaku Usaha Digital di Indonesia .....	18
B. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	21
C. Paradigma dalam Organisasi Industri.....	25
D. Larangan dalam Hukum Persaingan Usaha .....	30
E. Merger (Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan).....	37
F. Pendekatan “ <i>Rules of Reason</i> ” dan “ <i>Per Se Illegal</i> ” dalam Hukum Persaingan Usaha.....	41
G. Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha .....	45
H. Prinsip Ekstrateritorial dalam Hukum Persaingan Usaha .....	56
I. Putusan KPPU dalam Penerapan Prinsip Ekstrateritorial.....	59
J. Landasan Teori .....	63
1. Politik Hukum .....	63



2. Teori Keadilan Bermartabat .....	66
K. Batasan Konsep .....	68
1. Politik Hukum .....	68
2. Kewenangan .....	69
3. Ekonomi Digital .....	70
4. Prinsip Ekstrateritorial .....	71
<b>BAB III CARA PENELITIAN .....</b>	<b>82</b>
A. Jenis Penelitian .....	82
B. Pendekatan Penelitian .....	82
C. Sumber Bahan Hukum .....	84
D. Teknik Pengumpulan Data .....	84
E. Teknik Analisis Data .....	85
F. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	85
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>86</b>
A. Kompleksitas Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital .....	86
1. <i>Big Data</i> .....	88
2. Algoritma .....	91
3. Kecerdasan Buatan ( <i>Artificial Intelligence</i> ) .....	98
B. Kendala Yurisdiksi Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital .....	101
C. Konfigurasi Politik Hukum Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital .....	103
1. Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum Persaingan Usaha .....	103
2. Urgensi Penguatan Kewenangan KPPU di Era Ekonomi Digital dalam Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 .....	120
D. <i>Ius Constituendum</i> Penguatan Kewenangan Ekstrateritorial Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital .....	123
1. Perluasan Definisi Pelaku Usaha .....	123
2. Akomodasi Paradigma Ekonomi Industri Baru ( <i>New Industrial Economics</i> ) .....	129
3. Penggunaan Doktrin Efek dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha .....	130
4. Kewenangan Penggeledahan dan Memaksa Kehadiran Pelaku Usaha atau Saksi .....	138
E. Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital ...	140
F. Mewujudkan Keadilan Bermartabat dalam Hukum Persaingan Usaha .....	143

1. Pancasila Sebagai Norma Dasar Hukum Persaingan Usaha .....	143
2. Optimalisasi Unsur-Unsur Hukum Persaingan Usaha Mewujudkan Keadilan Bermartabat di Era Ekonomi Digital.....	147
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>151</b>
A. Kesimpulan .....	151
B. Saran.....	152
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>153</b>

## ABSTRAK

Tesis ini berangkat dari permasalahan praktik bisnis yang menguasai pasar di era ekonomi digital didominasi oleh pelaku usaha yang berasal dari luar negeri, sedangkan hukum persaingan usaha di Indonesia masih bersifat konvensional dan belum menjangkau pelaku usaha luar negeri. Penelitian tesis ini bertujuan menemukan dan menganalisis kewenangan yang dimiliki oleh KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha yang melibatkan pelaku usaha luar negeri, dan merumuskan *ius constituendum* penguatan kewenangan KPPU yang mengakomodasi prinsip ekstrateritorial. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan politik hukum, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif dengan model penarikan kesimpulan secara deduktif, yakni dari konsep umum kewenangan yang ditarik kesimpulan khusus mengenai kewenangan KPPU di era ekonomi digital. Hasil penelitian tesis ini menemukan bahwa kompleksitas persaingan usaha di era ekonomi digital yang bersifat *multi-sided markets* dengan penggunaan teknologi seperti *big data*, *algoritma*, dan *artificial intelligence* yang bersifat otomatisasi dapat mengarah pada perilaku anti persaingan seperti praktik jual rugi, diskriminasi harga, dan kolusi terselubung. Kewenangan KPPU yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengalami keterbatasan yurisdiksi dalam menangani perkara persaingan usaha yang melibatkan pelaku usaha luar negeri di era ekonomi digital karena definisi pelaku usaha belum mengakomodasi prinsip ekstrateritorial. Konfigurasi politik hukum yang terbentuk dalam hukum persaingan usaha berlangsung secara demokratis dan menghasilkan produk hukum yang responsif. Rumusan *ius constituendum* terkait perubahan definisi pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diperlukan menyangkut unsur subjek hukum, domisili hukum, dan perbuatan hukum, penerapan alat bukti tertulis yang lebih menguatkan kewenangan KPPU dibandingkan alat bukti surat/dokumen yang bersifat limitatif dalam menangani perkara persaingan usaha yang melibatkan pelaku usaha luar negeri di era ekonomi digital.

**Kata Kunci:** Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pelaku Usaha, Ekonomi Digital, Politik Hukum Mahfud MD, Prinsip Ekstrateritorial.

## **ABSTRACT**

*This thesis addresses the challenge posed by foreign business entities dominating the market in the digital economy era, juxtaposed against the conventional nature of Indonesian competition law that fails to extend its reach to foreign business entities. The primary objective of this research is to explore and scrutinize the jurisdictional authority vested in the KPPU when dealing with competition cases involving foreign businesses. This thesis seeks to formulate *ius constituendum* to enhance the KPPU's authority, aligning it with extraterritorial principles. Employing a normative juridical research method, the study incorporates a legal political approach, legislative analysis, and conceptual framework. Secondary data, comprised of primary legal sources and secondary legal materials, obtained through literature reviews, serve as the basis for qualitative analysis. Utilizing a deductive conclusion drawing model, specific conclusions regarding the KPPU's authority in the digital economy era are drawn from the general concept of authority. The findings reveal the intricate nature of business competition in the digital economy, characterized by multi-sided markets and the use of automated technologies like big data, algorithms, and artificial intelligence, which can lead to anti-competitive practices such as predatory pricing, price discrimination, and covert collusion. The KPPU's authority, as stipulated in Article 36 of Law Number 5 of 1999, faces limitations in handling competition cases involving foreign business entities, primarily due to the absence of extraterritorial considerations in the definition of business entities. The democratic formation of legal-political configurations in competition law results in responsive legal frameworks. Formulating *ius constituendum*, particularly in amending the definition of business entities in Law Number 5 of 1999, addressing elements of legal subjects, legal domicile, and legal acts.; emphasis on the application of written evidence strengthens the KPPU's authority, surpassing the limitations imposed by documentary evidence in handling competition cases involving foreign businesses in the digital economy era.*

**Keywords:** *Business Competition Supervisory Commission, Business Actors, Digital Economy, Politics and Law Mahfud MD, Extraterritorial Principles.*